

The Relationship Between The Economic Growth And Income Gap* (Case Study of Lampung Province)

Toto Gunarto* and Marselina**
University of Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

ABSTRACT

The improvement of economic growth policy is not guarantee that the income gap among region is small. The higher economic growth, the bigger gap in income. The aims of the research are to prove this statement, to find some regions that are in this position and give a policy recommended to government. To find income gap among regions is used Gini Ratio. To relate between income gap and economic growth is used Tipologi Klassen. Based on the result, 8 regions in Lampung Province are in quadrant I in which their economic growth are higher and income gap is smaller than on the average, 5 regions are in quadrant II in which the economic growth and income gap are lower than an average, 2 regions are in quadrant III in which the economic growth and income gap are higher than on the average. no region in quadrant IV. It can be proved that, the higher economic growth is not guarantee the smaller income gap. Because of the budget limitation, the priority of policy which is recommended is, firstly how to smaller the income gap and the next, is how to improve the growth. For the higher economic growth regions, its policy is, how to improve the quality of growth and push the other regions surrounding.

Key words: income disparity, Gini Raio, economicgGrowth, thypologi Klassen

Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah (Studi Kasus Provinsi Lampung)

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diduga tidak disertai dengan tingkat pemerataan pendapatan. Pertumbuhan yang tinggi di suatu wilayah diduga justru memiliki kesesenjangan pendapatan yang tinggi. Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan hal ini serta untuk menentukan kabupaten/kota mana saja

yang pertumbuhannya tinggi namun tumbuh atau tidak tumbuh dengan baik dan ketimpangan pendapatan yang terjadi menggunakan analisis gini ratio dan tipologi kelas. Analisis diawali dengan menghitung ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota dengan menggunakan metode gini rasio. Hasil gini ratio ini kemudian dihubungkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi menggunakan Kuadran Tipologi Kelas. Sebagai studi kasus digunakan kasus di Provinsi Lampung yang memiliki 16 kabupaten/kota. Diperoleh hasil bahwa terdapat 8 kabupaten yang berada pada kuadran I yaitu kabupaten/kota yang tingkat pertumbuhan ekonominya relative lebih rendah dari rata-rata provinsi dan memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang rendah. Terdapat 5 kabupaten/kota yang berada pada kuadran II yaitu kabupaten yang tingkat pertumbuhan ekonomi relative lebih rendah dari rata-rata provinsi dengan tingkat ketimpangan pendapatan rata-rata rendah. Terdapat 2 kota yang berada pada kuadran III yaitu kabupaten/kota yang pertumbuhan ekonominya relative tinggi dari rata-rata provinsi Lampung namun dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi. Sehingga terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak disertai dengan pemerataan pendapatan yang rendah sehingga karena ada keterbatasan anggaran, maka harus ada prioritas kebijakannya yaitu utamakan daerah yang ketimpangannya tinggi melalui kebijakan mengurangi ketimpangan pendapatan terlebih dahulu baru kemudian meningkatkan pertumbuhan dan tingkatkan kualitas pertumbuhan untuk daerah yang pertumbuhannya sudah tinggi.

Key words: ketimpangan pendapatan gini ratio , pertumbuhan ekonomi, tipologi kelas

Latar Belakang Masalah

Ketimpangan pendapatan merupakan masalah besar bagi pembangunan nasional saat ini. Kebijakan pembangunan nasional yang diharapkan adalah kebijakan pembangunan yang inklusif yaitu kebijakan yang menghasilkan pembangunan yang berkualitas, yang berkeadilan dan merata. Namun hingga saat ini kebijakan pembangunan daerah di Indonesia diduga masih belum mampu mewujudkan pembangunan inklusif tersebut, yang ditunjukkan dengan masih tingginya ketimpangan pendapatan antar wilayah. Isu kesenjangan pendapatan ini telah lama menjadi bahan kajian para pakar ekonomi namun

belum mampu mengentaskan ketimpangan ini. Wilayah atau daerah yang mempunyai pertumbuhan tinggi biasanya mempunyai ketimpangan yang tinggi. Tingginya ketimpangan pendapatan suatu wilayah ini akan berdampak buruk bagi pembangunan secara menyeluruh karena wilayah yang timpang akan menahan laju percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah lainnya. Sementara wilayah yang pertumbuhannya rendah biasanya mengalami ketimpangan pendapatannya rendah karena memang tidak ada yang dapat dibagikan antar golongan masyarakat. Hal ini didukung dalam penelitian Esmara (1975) yang menemukan adanya kesenjangan yang rendah antar daerah. Seperti halnya propinsi lainnya di Indonesia, pembangunan ekonomi di propinsi Lampung tidak merata di setiap daerah kabupaten/kota. Propinsi Lampung yang memiliki 14 daerah kabupaten/kota mengalami kesenjangan distribusi pendapatan antar penduduk bahkan isu kesenjangan ekonomi antar daerah telah lama menjadi bahan kajian para pakar ekonomi regional

Berbagai alat analisis banyak digunakan untuk menilai ketimpangan pendapatan antar wilayah ini. Ardani (1996) salah satunya, yang menganalisis kesenjangan pendapatan menggunakan Indeks Williamson. Penelitiannya menemukan bahwa pembangunan pada tahap awal akan terjadi kesenjangan pendapatan antar daerah, namun dengan berlangsungnya waktu maka kesenjangan akan berkurang. Sementara pendekatan lain yang digunakan untuk menghitung ketimpangan antara wilayah menggunakan indeks gini *atau Gini Ratio*.

Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, diduga sebagai penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan antar wilayah ini. Tipologi Klassen pada dasarnya adalah salah satu metode pendekatan yang menghubungkan antara dua fenomena yang dimasukkan dalam empat kuadran. Tipologi Klassen dalam penelitian ini dimodifikasi dengan membagi kuadran berdasarkan dua indikator utama yang telah didesign sedemikian rupa untuk mencapai tujuan penelitian yaitu, pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertical dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal maka daerah yang diamati dapat dibedakan menjadi 4 (empat) klasifikasi yaitu: daerah cepat-maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*); daerah maju tetapi tertekan (*high income but low growth*); daerah berkembang cepat (*high growth*

but low income); dan yang keempat adalah daerah relative tertinggal (*low growth and low income*).

Kriteria yang digunakan untuk membagi daerah tingkat 2 dalam penelitian ini adalah:

1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan propinsi.
2. Daerah maju tapi tertekan, yaitu daerah yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi tetapi pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan propinsi.
3. Daerah berkembang adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah daripada rata-rata pendapatan perkapita propinsi.
4. Daerah relative tertinggal yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata propinsi.

Propinsi Lampung seperti yang dijelaskan dimuka memiliki 15 daerah kabupaten/kota. Ada beberapa kabupaten/kota yang termasuk daerah tertinggal dengan penduduk miskin yang tinggi dan beberapa kabupaten/kota lainnya sudah mengalami kemajuan namun angka yang pasti belum didapat. Berikut ini disajikan jumlah penduduk miskin antar kabupaten di Propinsi Lampung disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Provinsi Lampung 2012

Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)
Lampung Barat	67.900	269.670
Tanggamus	92.700	250.134
Lampung Selatan	177.700	256.153
Lampung Timur	189.500	257.284
Lampung Tengah	187.000	271.262
Lampung Utara	155.800	274.291
Way Kanan	72.500	241.330

Tulang Bawang	40.700	256.793
Pesawaran	77.100	251.723
Pringsewu	43.000	269.212
Mesuji	15.300	256.185
Tulangbawang Barat	18.100	253.773
Bandarlampung	121.600	359.948
Metro	19.000	225.231

Sumber : Lampung Dalam Angka 2013

Berdasarkan data BPS tahun 2013 sebanyak 32,26% penduduk di Lampung berada dalam katagori pra sejahterah atau wilayah dengan ketimpangan tinggi. Banyaknya jumlah penduduk miskin adalah akibat ketidakmerataan pembangunan antar daerah

Pertanyaan penelitiannya adalah apakah kesenjangan pendapatan antar wilayah mempunyai hubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Di wilayah mana saja kondisi ini terjadi dan kebijakan apa yang sesuai dengan karakteristik masing masing wilayah .Kabupaten/kota mana saja yang masuk dalam kelompok pembangunan yang berhasil yaitu daerah atau wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun ketimpangan rendah atau kebijakan pembangunan yang kurang tepat yaitu kabupaten/kota yang pertumbuhan ekonomi tinggi dan ketimpangannya juga tinggi . Untuk memperoleh hasil tersebut perlu dilakukan penguitungan ketimpangan pendapatan antar wilayah terlebih dahulu. Kemudian mencoba menghubungkan antara ketimpangan pendapatan wilayah dengan pertumbuhan ekonominya. Pada perkembangan terakhir, untuk menghubungkan kesenjangan dan pola struktur ekonomi masing-masing daerah digunakan alat analisis tipologi Klassen.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi bagaimana kondisi ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Propinsi Lampung menggunakan Gini Ratio serta bagaimana hubungan antara ketimpangan antar pendapatan dengan pertumbuhan ekonominya dan kabupaten/kota mana saja yang berada pada kriteria Tipologi Klassen yang dimaksud. Akhir dari penelitian ini adalah usulan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah bagi masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan kondisi ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonominya. Prioritas kebijakan harus dilakukan karena di tengah keterbatasan anggaran pembangunan daerah saat ini pemerintah daerah harus memilih apakah akan melakukan kebijakan pertumbuhan terlebih dahulu ataukah pemerataan.

Kajian Pustaka

Distribusi pendapatan dan Ketimpangan Pendapatan

Teori distribusi pendapatan nasional pada dasarnya mempersoalkan persentase penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan dan membandingkannya dengan persentase pendapatan total. Distribusi pendapatan dapat mempengaruhi corak permintaan terhadap berbagai jenis barang. Sejumlah pendapatan masyarakat yang tertentu besarnya akan menimbulkan corak permintaan masyarakat yang berbeda apabila pendapatan tersebut diubah corak distribusinya. Ahli ekonomi membedakan dua ukuran pokok distribusi pendapatan yang digunakan (Tadaro dan Smith, 2006) yaitu *size distribution of income* (distribusi ukuran pendapatan) dan *functional or factor share distribution of income* (distribusi pendapatan fungsional atau pangsa distribusi pendapatan per faktor produksi). *Size distribution of income* dapat secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Berdasarkan ukuran ini, seberapa banyak pendapatan yang diterima individu, tanpa melihat sumbernya. Selain itu, lokasi sumber penghasilan (desa atau kota) maupun sektor usaha yang menjadi lapangan pekerjaan utama juga diabaikan. Sedangkan *functional or factor share distribution of income* berfokus pada bagian dari pendapatan nasional total yang diterima oleh masing-masing faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja dan modal.

Koefisien Gini (Gini Ratio)

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus umum koefisien Gini diperlihatkan pada persamaan berikut, sedangkan cara perhitungannya sebagai berikut.

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n [fP_i(F_{Ci} + F_{Ci} - 1)]$$

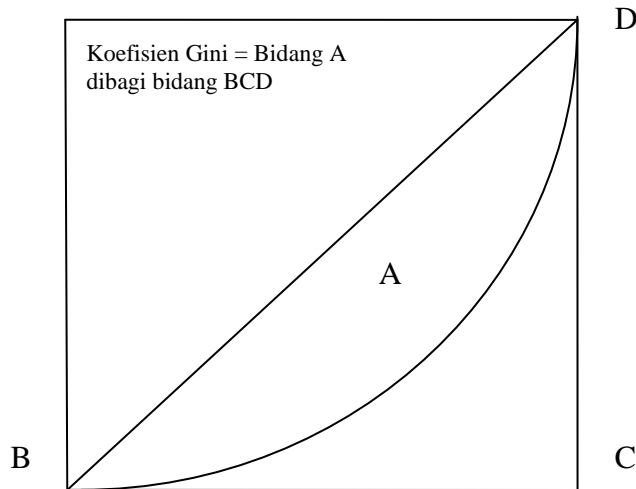
Dimana :

GR : Koefisien Gini (Gini Ratio)

fP_i : Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

fC_i : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

fC_{i-1} : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)



Sumber : Todaro dan Smith (2006)

Gambar 1. Kurva Lorenz

Suatu distribusi pendapatan dikatakan makin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0), sedangkan makin tidak merata suatu distribusi pendapatan maka nilai koefisien Gini-nya makin mendekati satu. Kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan Koefisien Gini (Susanti, 2007) adalah sebagai berikut :

- Lebih kecil dari 0,4 maka tingkat ketimpangan rendah
- Antara 0,4-0,5 maka tingkat ketimpangan tinggi

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan pertumbuhan nilai barang dan jasa di suatu negara selama 1 tahun pengamatan. Salah satu pendekatan untuk memperoleh angka pertumbuhan ekonomi adalah dengan menggunakan angka Produk Domestik Regional Bruto (daerah) berharga konstan pada tahun t dikurangi dengan angka Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya atau PDRB t-1 dibagi dengan Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya atau PDRB t-1 atau dengan rumus:

$$G_t = \left(\frac{G_t - G_{t-1}}{G_{t-1}} \right) * 100\%$$

Tipologi Klassen

Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Melalui analisis ini diperoleh empat karakteristik pola dan struktur pertumbuhan

ekonomi yang berbeda, yaitu: daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh (*high growth and high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but income*), dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) (Kuncoro dan Aswandi, 2002: 27-45) dan (Radianto, 2003: 479-499).

Tabel 2. Matriks Tipologi Klassen

	Y1>y	Y1
r1>r	Daerah cepat maju dan cepat tumbuh	Daerah Berkembang Cepat
r1	Daerah Maju Tapi tertekan	Daerah Relatif tertinggal

Metodologi

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dan kualitatif . Kajian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan berbagai ukuran rasio untuk menentukan kategori wilayah dan analisis kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertetu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *cross-section* . Data yang digunakan baik untuk menghitung koefisien Gini, bpertumbuhan ekonomi menggunakan data mentah (*raw data*) yang bersumber dari data Susenas. Data ini diterbitkan oleh BPS yang awalnya dilakukan dengan pemilahan data, pengkategorian dan coding data. Untuk menentukan kategori wilayah berdasarkan kondisi ekonominya digunakan data PDRB , jumlah penduduk, jumlah TK dll yang diterbitkan oleh BPS dari berbagai periode. Data dan informasi diolah menggunakan formula tipologi Klassen dan formula indeks gini ratio lalu hasilnya dianalisis dengan metode deskriptif untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertetu antara suatu gejala dan gejala lain dalam objek penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Koefesien Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

Untuk memperoleh angka Gini Ratio dilakukan penghitungan awal untuk menentukan a. frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i, b. frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i, dan c. frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1) Berdasarkan hasil perhitungan Gini Ratio diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 3 : Nama Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung serta Koefisien Gini Ratio.

Kode Wilayah	Kabupaten Kota	GR
1	Lampung Barat	0,3409
2	Tanggamus	0,3182
3	Lampung Selatan	0,3427
4	Lampung Timur	0,3687
5	Lampung Tengah	0,3608
6	Lampung Utara	0,3165
7	Way Kanan	0,3473
8	Tulang Bawang	0,3550
9	Pesawaran	0,3199
10	Pringsewu	0,3425
11	Mesuji	0,3093
12	Tulang Bawang Barat	0,3404
13	Pesisir Barat	0,2948
14	Bandar Lampung	0,3934
15	Metro	0,4002

Hubungan Ketimpangan Pendapatan dengan Pertumbuhan Ekonomi

Langkah selanjutnya adalah menghubungkan antara nilai koefisien Gini Ratio dengan tingkat pertumbuhan ekonomi setiap kabupaten /kota dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 4: Hubungan Gini Ratio (GR) dengan Pertumbuhan Ekonomi Se Propinsi Lampung

Kode Wilayah	Kabupaten Kota	GR	PERTUMBUHAN EKONOMI
1	Lampung Barat	0,34	5,29
2	Tanggamus	0,32	5,03
3	Lampung Selatan	0,34	5,37
4	Lampung Timur	0,37	4,26
5	Lampung Tengah	0,36	5,33
6	Lampung Utara	0,32	5,43
7	Way Kanan	0,35	5,27
8	Tulang Bawang	0,36	4,54
9	Pesawaran	0,32	5,11
10	Pringsewu	0,34	5,22

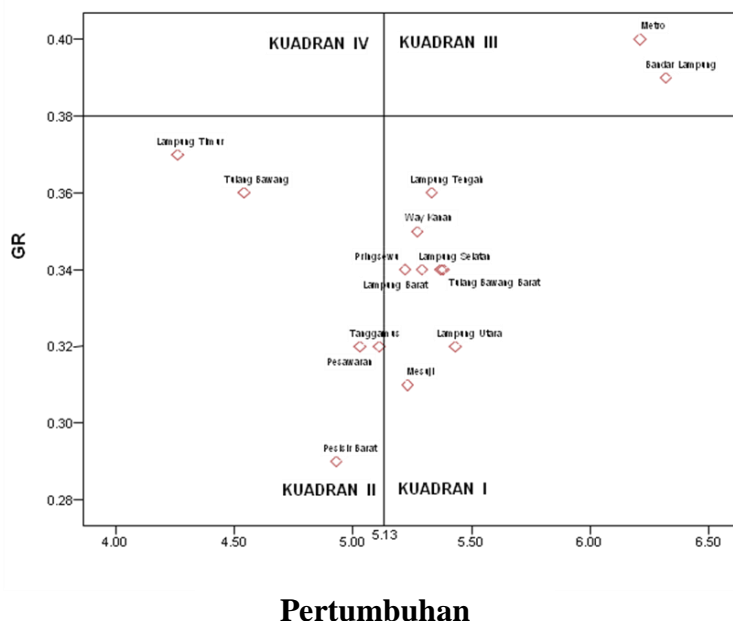
11	Mesuji	0,31	5,23
12	Tulang Bawang Barat	0,34	5,38
13	Pesisir Barat	0,29	4,93
14	Bandar Lampung	0,39	6,32
15	Metro	0,40	6,21
16	Prov. Lampung	0,38	5,13

Analisa Tipologi Klasen

Tipologi Klasen adalah salah satu metode untuk menghubungkan antara ketimpangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonominya. Kabupaten yang terbaik jika pertumbuhan ekonominya tinggi namun pemerataan pendapatannya merata. Sebaliknya kabupaten/kota yang buruk jika pertumbuhan ekonomi rendah dan ketimpangan pendapatan tinggi. Secara detil pembagian kuadran sebagai berikut.

- Kuadran I Daerah yang memiliki Pertumbuhan Ekonomi lebih Rendah dan Gini Ratio lebih Tinggi dari Provinsi
- Kuadran II Daerah yang memiliki Pertumbuhan Ekonomi lebih Rendah dan Gini Ratio lebih Rendah dari Provinsi
- Kuadran III Daerah yang memiliki Pertumbuhan Ekonomi lebih Tinggi dan Gini Ratio lebih Tinggi dari Provinsi
- Kuadran IV Daerah yang memiliki Pertumbuhan Ekonomi lebih Tinggi dan Gini Ratio lebih Rendah dari Provinsi

Hasil Tipologi Klassen



Berdasarkan diagram Tipologi Klassen dapat diuraikan beberapa kabupaten/kota di Propinsi Lampung yang berada pada 4 kuadran Klassen, dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 5. Kabupaten/Kota Se Propinsi Lampung yang Berada pada 4 Kuadran Klassen

Kuadran I	Lampung Tengah Way Kanan Lampung Selatan Pringsewu Lampung Barat Tulang Bawang Barat Lampung Utara Mesuji
Kuadran II	Lampung Timur Tulang Bawang Tanggamus Pesawaran Pesisir Barat
Kuadran III	Metro Bandar Lampung
Kuadran IV	-

Dari 15 kabupaten/kota se propinsi Lampung terdapat 8 kabupaten yang berada di kuadran I yaitu wilayah yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan rata rata se propinsi Lampung dengan ketimpangan yang rendah . Kabupaten yang dimaksud adalah kabupaten Lampung Tengah, Way Kanan, Lampung Selatan, Pringsewu, Lampung Barat, Tulang Bawang Barat, Lampung Utara dan Mesuji. Dari 8 kabupaten tersebut, terdapat 7 kabupaten yang relative baru menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Dengan keberadaan DOB ini masih terbuka lebar bentuk- bentuk kebijakan pembangunan daerah yang bisa diimplementasikan setelah mandiri. Euforia kebijakan pembangunan mandiri membuka peluang terciptanya tantangan kebijakan pembangunan daerah yang inklusif.

Terdapat 5 kabupaten yang berada pada kuadran II yaitu Kabupaten Lampung Timur, Tulang Bawang , Pesisir Barat, Tanggamus dan Pesawaran. Ciri dari kelima kabupaten ini berdasarkan Tipologi Klassen adalah kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah dan ketimpangan rendah.

Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan rata rata pertumbuhan di propinsi Lampung disebabkan karena produktivitas produksi

yang selama ini dikelola secara konvensional belum mampu bergerak (*move on*) secara signifikan. Kondisi lahan yang makin sempit, tidak lagi subur dan kurang mendapat sentuhan teknologi yang tinggi, umur tanaman yang sudah tua dan diganti, SDM pekerja yang tidak produktif, jumlah investasi yang masuk tidak meningkat signifikan karena keterbatasan infrastruktur dan tingginya angka kriminalitas diduga penyebab rendahnya angka pertumbuhan ekonomi di 5 kabupaten ini.

Berdasarkan hasil kuadran Tipologi Klassen diperoleh atau terdapat 2 Kota yang berada pada kuadran III yaitu wilayah yang mempunyai rata-rata pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung namun dengan rata-rata tingkat ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi Lampung. 2 kota yang berada pada kuadran III ini yaitu kota Metro dan Bandar Lampung. Melihat ciri pada kuadran III ini maka kebijakan pembangunan daerah di 2 kota ini harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah provinsi. Utamanya adalah kebijakan pembangunan daerah untuk mengurangi kesenjangan pendapatan. 2 wilayah ini adalah wilayah kota. Kota Bandar Lampung merupakan pusat pemerintahan dan ibukota Provinsi Lampung. Sebuah kota mempunyai ketertarikan tersendiri bagi penduduk di sekitar untuk memperbaiki taraf hidup. Migrasi ke kota akan sangat tinggi. Maka kebijakan yang harus diprioritaskan adalah berupa kebijakan membuka lapangan kerja sebanyak banyaknya, akses bantuan teknis dan permodalan. Tingkat kemiskinan di kota ini lebih parah dampaknya karena RT miskin ketika tidak mendapatkan makanan tidak dapat mengusahakannya sendiri (*subsisten*) seperti di pedesaan. Kemiskinan itu dirasakan mereka sendiri. Untuk itu perlu tambahan program jaring pengaman sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum mampu mengatasi ketimpangan pendapatan yang ada. Melihat hasil ini ternyata untuk wilayah perkotaan kebijakan pembangunan untuk yang fokus memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata tidak disertai dengan pemerataan pendapatan sehingga pertumbuhan yang tinggi justru memiliki kesenjangan yang tinggi. Tingkat pertumbuhan ekonomi ternyata hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, hal ini terlihat dari indeks ketimpangan masih tinggi yang terjadi di kabupaten – kabupaten yang pertumbuhan relative tinggi. Sedangkan terdapat 5 kabupaten yang

mempunyai pertumbuhan ekonomi yang rendah dan ketimpangannya juga rendah karena memang tidak ada yang dapat dibagikan lebih banyak, namun ketimpangan pendapatan dapat diselesaikan penduduk dengan pertanian subsisten .

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kebijakan pembangunan ekonomi yang memfokuskan pada upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata belum mampu melakukan upaya pemerataan pembangunan dan dua kebijakan yang dilakukan secara bersama, belum dapat dilakukan, sehingga pemerintah daerah harus memilih apakah akan melakukan kebijakan pertumbuhan terlebih dahulu ataukah kebijakan pemerataan dahulu. Sehingga rekomendasi kebijakan pembangunan yang diberikan adalah untuk kabupaten yang rata-rata pertumbuhannya tinggi namun ketimpangan pendapatannya tinggi, maka kebijakan yang perlu dilakukan adalah kebijakan mengurangi ketimpangan pendapatan terlebih dahulu, karena ketimpangan yang tinggi akan meningkatkan kerawanan dan ketidakstabilan dalam perekonomian. Untuk kabupaten yang tingkat pertumbuhan ekonomi masih rendah, sebaiknya kebijakan pembangunannya lebih ditekankan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu untuk mengatasi ketertinggalan selama ini agar bisa berlari bersama dengan kabupaten lainnya yang lebih maju. Setelah pertumbuhan ekonomi yang tinggi tercapai maka kebijakan pembangunan selanjutnya adalah pada kebijakan pemerataan pendapatan.

Daftar Pustaka

-----2013. *Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia 2013*. BPS. Jakarta.

_____2013. *Lampung Dalam Angka*. BPS. Lampung.

-----2013. *Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)*. BPS. Jakarta.

Widarjono, A. 2013. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Edisi Ketiga. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Agustin, N. 2012. *Analisis Konsumsi Rumah Tangga Petani Padi dan Palawija di Kabupaten Demak*. Skripsi. UNDIP. Semarang.

Toto Gunarto, Marselina

Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah (Studi Kasus Provinsi Lampung)

Alwi, H. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Anisa, Nurul,dkk. 2011. *Konsumsi Rumah Tangga pada Keluarga Sejahtera dan Pra Sejahtera di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar* . Jurnal. UNS.Semarang.

Banita, Dian. 2009. *Ketersediaan Pangan Pokok dan Pola Konsumsi Pada Rumah Tangga Petani di Kabupaten Wonogiri*. Jurnal. USM. Surakarta.

Danil, Mahyudi. 2013. *Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen*.Jurnal. STIE Kebangsaan Bireuen. Aceh.

Gilarso, T. 1992. *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*. Kanisius. Yogyakarta.

Hariato.2013. *Peluang yang Tersisa Meningkatkan Pendapatan Petani* .Artikel. BAPPENAS. Jakarta

Halyani, Krustin. 2008. *Analisis Konsumsi Rumahtangga Petani Wortel Di Desa Sukatani Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat*. Skripsi.IPB. Bogor.

Krisnawati, Enni. 2004. *Analisis pola konsumsi rumah tangga nelayan dalam perspektif ekonomi dan sosial*. Jurnal. Universitas Brawijaya. Malang.

Lamusa, Arifuddin. 2007. *Konsumsi rumah tangga petani di Wilayah Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) Studi kasus di Desa Katu Kecamatan Lore Tengah Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah*. Jurnal. Poso, Sulawesi Tengah.

Mankiw, N.Gregory, 2006. *Teori Makro Ekonomi*.Edisi 6. Penerbit Erlangga .Jakarta.

Michael Todaro dkk, 2006. *Pembangunan Ekonomi (Terjemahan)* Edisi kesembilan. Jllid 1. Penerbit Erlangga

Mudrajad Kuncoro. 2006. *Ekonomika Pembangunan: Teori Masalah dan Kebijakan*. Edisi Keempat. Penerbit STIM YKPN.

Nicholson, W.1995. *Teori Ekonomi Mikro Prinsip Dasar dan Pengembangannya*. PT Radja Grafindo. Jakarta.

Nicholson, W.2002. *Mikro Ekonomi Intermediate dan Aplikasinya*. Penerbit Erlangga. Jakarta

Payman, Simanjuntak.1985. *Produktivitas Dan Tenaga Kerja Indonesia*. FEUI. Jakarta.

Priyanto, Ruri. 2007. *Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga karyawan PT. Askes (Persero) Cabang Jember*. Jurnal. Jember, Jawa Timur.

Toto Gunarto, Marselina

Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah (Studi Kasus Provinsi Lampung)

Pyndyck, S Robert dan Rubinfeld, L Daniel. 2007. *Mikroekonomi*. PT Indeks. Jakarta

Pusposari, Fitria. 2012. *Analisis pola konsumsi pangan masyarakat di Provinsi Maluku*. Tesis. Universitas Indonesia. Depok.

Rochaeni, Siti dkk. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Ekonomi Rumah Tangga Petani Di Kelurahan Setugede Kota Bogor*. *Jurnal Agro Ekonomi*. Pusat Analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Bogor.

Saptanto, Subhechanis, dkk. 2011. *Analisis pola migrasi dan konsumsi rumah tangga di daerah asal migrasi terkait kemiskinan dan kerentanan pangan (Studi kasus Indramayu)*. *Jurnal*. Indramayu, Jawa Barat.

Sasongko. 2009. *Pengaruh raskin terhadap pengeluaran konsumsi dan Sosial ekonomi serta kesejahteraan keluarga Di jawa timur*. *Jurnal*. UNBRAW. Malang.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama. Bandung.

Sukirno, S. 2007. *Makroekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Widyanto, Wahyu Bagus. 2007. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga buruh industri kecil di Kecamatan Turen Kabupaten Malang*. Skripsi. Universitas Jember. Malang.

Toto Gunarto, Marselina

*Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan
Antar Wilayah (Studi Kasus Provinsi Lampung)*